Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 No. 3 September 2011

Salam Redaksi

Menjadi pemimpin di Indonesia pada era demokrasi saat ini ternyata tidak mudah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono yang memperoleh suara terbanyak sebagai dasar legitimasi kekuasaan yang diperoleh pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 ternyata tidak memberikan garansi pemerintahannya akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat luas. Berbagai persoalan mendera, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang sebetulnya jika dipandang dari satu sisi merupakan ujian dan peringatan dalam upaya mendewasakan pemerintah dan mematangkan demokrasi

Dari berbagai masalah yang ada di negeri ini, perilaku anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II merupakan salah satu persoalan yang memberi beban kepada Presiden SBY. Kabinet yang dibentuk berdasarkan "kompromi" partai-partai koalisi sehingga lebih mirip bagi-bagi kue kekuasaan, satu persatu menunjukkan potensi masalah yang disandangnya, yang sebetulnya sudah terlihat sejak masih berkiprah di partainya. Dari persoalan keluarga yang berujung menjadi "gosip selebriti" pada infotainment sampai kepada masalah yang Presiden SBY sendiri programkan untuk diperangi, yaitu korupsi.

Perilaku anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang sedemikian menyebabkan kinerja Pemerintahan SBY menjadi kurang maksimal dalam upaya mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Tidak mengherankan pula jika hasil survey dari beberapa lembaga survey menunjukkan kepercayaan rakyat kepada Pemerintahan SBY menurun dengan amat signifikan. Memang metodologi dan hasil survey serta analisis yang dibuat lembaga itu masih bisa diperdebatkan, akan tetapi seharusnya hal ini menjadi cermin bagi pemerintah untuk memperbaiki diri. Salah satu solusi yang sejak tahun lalu dilontarkan adalah dengan meresuffle menteri-menteri yang bermasalah atau tidak menunjukkan kinerja yang baik. Jika tahun lalu usul ini kandas karena Presiden SBY masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, maka pada tahun ini usul reshuffle mendesak untuk dilaksanakan dengan melihat pada kinerja beberapa menteri yang semakin memburuk.

Melakukan suatu perbuatan menuju ke perbaikan tidak sekadar bermodal keberanian semata. Dalam hal ini, Presiden SBY kembali dituntut untuk jeli melihat potensi calon menteri yang hendak didudukkan dalam Kabinet Indonesia Bersatu menggantikan menteri-menteri yang bermasalah. Permasalahannya adalah, seringkali Presiden kita terlalu berhati-hati dan cenderung "kurang berani" dan "kurang tegas" dalam bertindak terhadap para pembantunya. Memang susah jika diri telah dihinggapi hutang budi, hingga berbuat baik pun seakan dihindari. Kita masih menunggu keberanian dalam meresuffle kabinet dan kejelian dalam memilih pembantu-pembantunya dari Presiden SBY. Selamat menunggu dengan harap-harap cemas akan masa depan negeri ini.

Purwokerto, September 2011

Ketua Penyunting

Agus Raharjo